

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) United Nation World Tourism Organization (UNWTO), untuk mencapai tujuan tersebut UNWTO meluncurkan sebuah program bernama *Sustainable Tourism – Eliminating Poverty* (ST-EP) di tahun 2002. *Pro-poor Tourism* merupakan salah satu agenda dalam ST-EP yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di destinasi wisata.

Masih banyaknya kasus masyarakat lokal yang tidak merasakan manfaat dari kegiatan pariwisata yang diadakan di daerahnya menjadi dasar penyusunan skema ST-EP sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan seperti Pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba (NGO), dan lain-lain untuk berkomitmen secara bersama-sama membangun perekonomian destinasi salah satunya dengan cara mengikutsertakan (memberdayakan) masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata.

Hingga tahun 2017 UNWTO telah menghasilkan sebanyak 120 proyek berbasis ST-EP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di beberapa Negara. Tahun 2016, Pemerintah Kepulauan Comoro menyelenggarakan 38 program edukasi yang berfokus pada pengetahuan pariwisata dan perubahan iklim bagi masyarakat pra sejahtera yang tinggal disekitar destinasi wisata. Kepulauan

Comoro yang terancam tenggelam karena pemanasan global memerlukan kader-kader lokal yang dapat memahami urgensi hal ini serta dapat mengedukasi masyarakat sekitar mengenai resiko pemanasan global yang dapat merusak sumber daya pariwisatanya. Keikutsertaan dalam program pemberdayaan masyarakat menjadi bekal ilmu tersendiri bagi masyarakat lokal untuk turut menjaga alam dengan menjalankan kegiatan pariwisata berkelanjutan, mengembangkan kapasitas diri serta melihat peluang bisnis yang timbul dari kegiatan wisata yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Comoro saat ini.

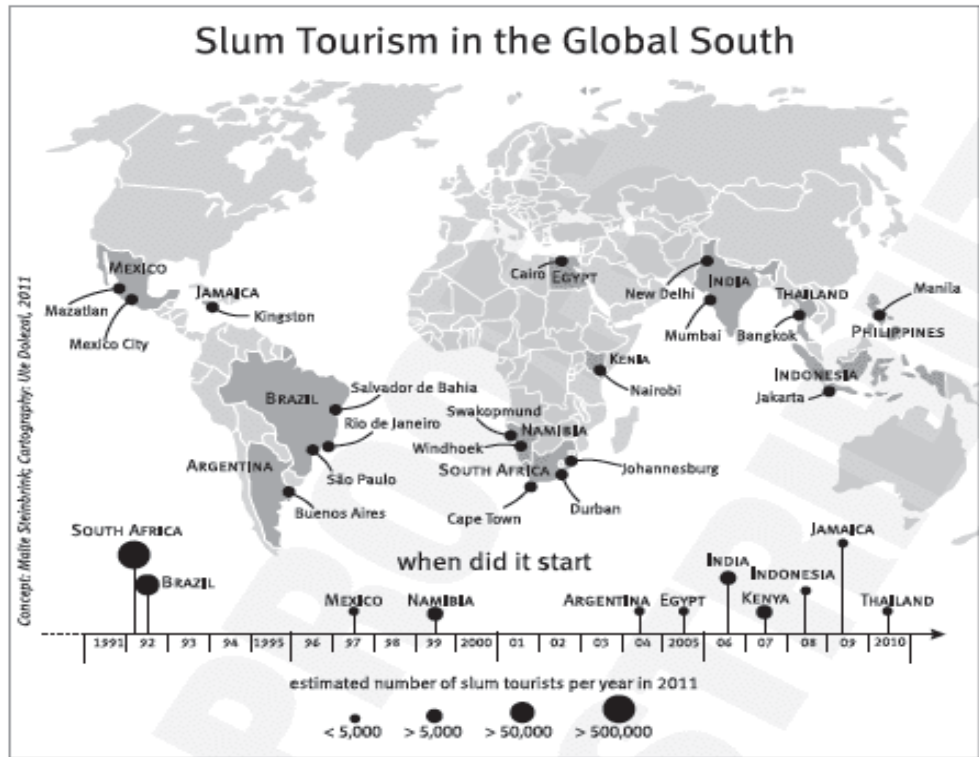
Program pemberdayaan masyarakat berbasis ST-EP yang diintegrasikan dengan *slum tourism* diselenggarakan di Afrika Selatan, *slum tourism* di Afrika Selatan menjadi *prototype* keberhasilan program *pro-poor tourism* serta sinergitas para pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat pra sejahtera di destinasi *slum tourism* dengan membentuk program '*Black Economic Empowerment*' dimana program ini memungkinkan masyarakat pra sejahtera (di destinasi *slum tourism*) untuk memiliki bisnis kecil di wilayah tersebut, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan tingkat kriminalitas.

Slum tourism tidak akan berdampak positif pada masyarakat pra sejahtera apabila tidak didasari dengan semangat *pro-poor*, tidak diikutsertakannya masyarakat pra sejahtera di destinasi wisata dalam program pemberdayaan masyarakat oleh penyelenggara *slum tourism* serta pembagian hasil yang tidak adil antara penyelenggara dengan masyarakat di destinasi *slum tourism*

menyebabkan kegiatan ini berpotensi mengarah kepada eksploitasi dan *voyeurism*. Freires-Medeiros (2009), berpendapat bahwa isu utama dalam komersialisasi kemiskinan pada akhirnya selalu bermuara kepada pertanyaan siapa yang diuntungkan dari kegiatan ini karena sebagian besar penyelenggara kegiatan *slum tourism* hanya memiliki dokumen dukung yang minim untuk membuktikan dampak positif *slum tourism* terhadap pengentasan kemiskinan.

Walaupun sudah banyak pihak mengkonfirmasi bahwa kegiatan *slum tourism* dapat memberikan manfaat ekonomi/non-ekonomi pada komunitas lokal, Pemerintah serta Negara, minimnya bukti nyata pertumbuhan ekonomi di kawasan kumuh membuat kegiatan ini terus mendapat perlawanan. *Slum tourism* sesungguhnya turut memacu tumbuhnya usaha-usaha mikro (Kieti dan Magio, 2013; Koens, 2012; Rogerson, 2004; Koens dan Thomas, 2015) namun karena dianggap pertumbuhan berskala kecil, usaha mikro penunjang kegiatan *slum tourism* tidak dapat dikategorikan sebagai dampak positif dari kegiatan ini.

GAMBAR 1
PETA PERKEMBANGAN SLUM TOURISM DI DUNIA



Sumber: *Slum Tourism: Poverty, Power, and Ethics*; 2012.

Keberadaan NGO tidak bisa dilepaskan dari eksistensi *slum tourism* di beberapa Negara. Selain sebagai penyelenggara, NGO juga berperan penting untuk menciptakan kegiatan *slum tourism* yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat). United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mengungkapkan bahwa aspek pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera di destinasi *slum tourism* merupakan hal yang sangat krusial dikarenakan *slum tourism* sering dianggap sebagai suatu kegiatan wisata yang mengeksploitasi kaum miskin; UNWTO kembali

mengungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan *slum tourism* dimanapun perlu menerapkan konsep *pro-poor* yaitu suatu konsep yang menempatkan masyarakat pra-sejahtera di destinasi *slum tourism* sebagai mitra dan bukan objek tontonan. Konsep *pro-poor* yang diterapkan oleh para NGO penyelenggara kegiatan *slum tourism* juga dapat membantu NGO untuk selalu menempatkan kebutuhan masyarakat pra-sejahtera sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan *slum tourism*. Selain itu, fungsi lain dari NGO dalam kegiatan *slum tourism* adalah memberikan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi masyarakat lokal (*capacity building*) serta memfasilitasi dan melakukan kordinasi dengan para pemangku kepentingan (fungsi advokasi).

Komunitas Creavill (singkatan dari *Creative Village*) Bandung merupakan sebuah NGO pemberdayaan masyarakat yang didirikan tahun 2017 oleh Agung Gumelar dan Aji Imam Muflih sebagai salah satu cabang dari Komunitas Creavill untuk menangani kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota dan Kabupaten Bandung. Komunitas Creavill Bandung menjadi penyelenggara kegiatan *slum tourism* bertema *The Real Braga Tour* yang mengeksplorasi wilayah RW03, RW04, RW07 dan RW08 di Kelurahan Braga Kota Bandung.

Bertolak belakang dengan citranya sebagai kawasan elit sejak jaman kolonialisme Belanda di Indonesia, Kawasan Braga justru menyembunyikan permasalahan utamanya yaitu kemiskinan dan kekumuhan yang terkamufase di balik gedung-gedung artdeco megah. Berdasarkan data Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bandung Kementerian PUPR (2013) Kelurahan Braga

termasuk kawasan Kumuh Sedang, di Tahun selanjutnya (2014) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung menyatakan Kelurahan Braga masuk dalam 5 (lima) Kelurahan dengan kategori Kumuh Tinggi. Data terbaru dari e-Bappelitbang Kota Bandung (2022) menyatakan Kelurahan Braga termasuk dalam wilayah Kumuh Sedang.

GAMBAR 2 **PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN BRAGA**



Sumber: e-Bappelitbang Kota Bandung; 2022

Destinasi *slum tourism* dalam kegiatan *The Real Braga Tour* mencakup RW03, RW04, RW07 dan RW08 merupakan Desa Binaan Komunitas Creavill Bandung dimana masyarakat yang berdomisili di RW tersebut secara berkala diikutkan dalam program pemberdayaan sebagai salah satu bentuk *capacity building*. Dengan kata lain, Komunitas Creavill Bandung melalui kegiatan *slum*

tourism bertajuk *The Real Braga Tour* menjadi *agent of changes* bagi masyarakat pra sejahtera yang berdomisili di wilayah tersebut.

Salah satu proses pemberdayaan adalah menciptakan suasana atau iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara mengakses kebutuhan dan menjamin ketersediaan ketersediaan aset produktif yang ada. Dengan demikian, pemberdayaan dapat diarahkan pada transformasi sosial yang berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan (Putra, Rahmanda, Khadijah, Rakhman, dan Novianti, 2014, 11).

Menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan *slum tourism* dan mempublikasikannya menjadi sangat penting untuk dilakukan karena kegiatan ini memiliki potensi menciptakan konflik kedepannya seperti yang telah dialami oleh NGO penyelenggara *slum tourism* lain di wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Hidden Tour yang kerap menghadapi hambatan dari Pemerintah berkaitan dengan izin penyelenggaraan kegiatan *slum tourism*. Menteri Pariwisata periode 2004 – 2011 mengatakan bahwa kemiskinan merupakan hal yang seharusnya tidak dipublikasikan melalui kegiatan wisata. Selain itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab VII Pasal 26 tentang Hak, Kewajiban dan Larangan menyatakan bahwa menjaga citra negara melalui kegiatan usaha wisata oleh setiap pengusaha pariwisata merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, kemiskinan merupakan sebuah fenomena sosial yang

harus disampaikan secara terbuka kepada khalayak ramai agar dapat memicu gerakan perubahan.

Tidak hanya mengedepankan *tour* di kawasan kumuh, *The Real Braga Tour* juga menjadikan wisata sejarah dan pengenalan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Braga sebagai salah satu daya tarik utamanya, para peserta *tour* diajak untuk berinteraksi secara langsung dengan warga yang tinggal di wilayah Kelurahan Braga, melihat kegiatan keseharian masyarakat serta mengunjungi beberapa situs bersejarah di kawasan Braga.

Sustainable Tourism – Eliminating Poverty (ST-EP) disusun oleh UNWTO dengan tujuan agar para *stakeholders* berperan aktif dalam memerangi kemiskinan melalui kegiatan pariwisata, semangat UNWTO melalui program ST-EP dianggap sejalan dengan visi dan misi Komunitas Creavill Bandung dimana kegiatan *slum tourism* yang diselenggarakan diintegrasikan dengan prinsip *pro-poor* agar memberikan dampak positif terhadap masyarakat pra sejahtera yang wilayahnya dikunjungi, baik itu secara finansial maupun peningkatan kapasitas diri.

Salah satu indikasi keberhasilan dari kegiatan *slum tourism* yang mengedepankan prinsip *pro-poor* adalah hilangnya daya tarik dari kegiatan ini yaitu kemiskinan, secara perlahan mensejahterakan wilayah tersebut melalui kegiatan pariwisata. Idealnya seiring berjalannya waktu, kantong-kantong permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Braga yang dijadikan destinasi *slum tourism* perlahan menghilang dan berganti menjadi wilayah yang sejahtera.

Jurnal, buku dan publikasi lain dengan tema pemberdayaan masyarakat dan *slum tourism* dikaji untuk memperkuat pondasi penelitian dengan tujuan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi dunia akademik, kajian tersebut menghasilkan variable-variabel yang akan diuji sebagai berikut:

Melissa Nisbett (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Empowering the Empowered? Slum Tourism and the Depolitization of Poverty* mengkaji persepsi wisatawan asing terhadap kegiatan *slum tourism*. Nisbett mengemukakan fakta bahwa kegiatan *slum tourism* tidak selalu disertai dengan semangat pembangunan di kawasan pra sejahtera, Nisbett mengemukakan bahwa wisatawan justru menjadi pihak yang lebih terberdayakan (*empowered*) dalam kegiatan ini, bukan masyarakat setempat. Temuan di lapangan tersebut mengarahkan Nisbett untuk berpendapat bahwa mengentaskan kemiskinan memerlukan tanggung jawab dan kontribusi aktif dari pemerintah dan korporat besar, di sisi lain, penyelenggara *slum tourism* dapat memberdayakan masyarakat pra sejahtera dengan membangun pengetahuan politik masyarakat setempat serta mengedukasi wisatawan mengenai neoliberalisme yang timbul dari kegiatan *slum tourism*.

Kegiatan *slum tourism* yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat harus dikaji dari berbagai perspektif, salah satunya perspektif warga yang lingkungan tempat tinggalnya dijadikan destinasi *slum tourism*. Dalam penelitiannya yang berjudul *Breaking the Silence: Local Perceptions of Slum Tourism in Dharavi*, Slikker dan Koens (2015) mengutip pernyataan Nunkoo, Smith dan Ramkisson (2013) yang mengungkapkan bahwa masih minim

penelitian yang membahas mengenai perspektif masyarakat lokal terhadap kegiatan *slum tourism* yang diadakan di wilayahnya. Selain itu, peningkatan kualitas hidup dari kegiatan *slum tourism* yang seharusnya menjadi daya tarik utama dari kegiatan ini juga terlupakan (Burgold, Frenzel and Rolfes, 2013; Rolfes, 2010).

Program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini masih dianggap belum berhasil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Atma Ras dalam penelitiannya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan* (2013) menuliskan bahwa pendekatan top-down yang dilakukan pemerintah dalam program pembangunan menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, hal ini menyebabkan tingkat kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat pra sejahtera dimatikan, hal ini berakibat pada semakin tingginya kesenjangan perekonomian.

Untuk menjalankan peran advokasi bagi masyarakat pra sejahtera dan menjadi wadah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih *pro-poor*, *The Real Braga Tour* memiliki potensi untuk diselenggarakan dengan menjalin kerjasama jangka panjang dengan berbagai instansi formal maupun informal di lingkungan Kelurahan Braga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fabian Frenzel, Malte Steinbrink, and Ko Koens (2012) dalam buku yang berjudul *Slum Tourism: Poverty, Power, and Ethics* bahwa politisasi, kordinasi dan kolaborasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan *slum tourism*.

Setelah mengkaji beberapa literatur di atas, ditemukan beberapa kata kunci diantaranya politisasi, kolaborasi, tanggung jawab, perspektif masyarakat, peran Pemerintah, serta peran korporat, namun penelitian-penelitian tersebut belum secara terperinci membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera melalui kegiatan *slum tourism*. Kesimpulan lainnya adalah bagaimana sinergitas antara NGO sebagai penyelenggara kegiatan *slum tourism* dengan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan program pemberdayaan masyarakat pra sejahtera yang lebih masif dan sporadis untuk mengurangi kemiskinan. Penulis bermaksud mengisi *gap* penelitian dengan mengkaji bentuk dan potensi pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan *slum tourism* untuk menciptakan masyarakat perekonomian mandiri dengan harapan kedepannya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Braga akan berkurang sebagai dampak dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan *The Real Braga Tour*.

Selain sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat, karya ilmiah ini juga diharapkan akan menjadi salah satu kontribusi dalam memperkaya literatur dengan topik pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *slum tourism* yang dapat menjadi suatu alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang faktanya hingga saat ini masih belum banyak dibahas oleh komunitas akademisi, penelitian dengan topik ini dianggap masih cenderung baru karena masih minimnya literatur dengan topik serupa.

Berdasarkan gambaran umum dan latar belakang di atas, Tesis ini disusun dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN *THE REAL BRAGA TOUR* DI KELURAHAN BRAGA, KOTA BANDUNG.**

B. Fokus Penelitian

Program pemberdayaan masyarakat di lokus penelitian dianalisa menggunakan 3 (tiga) dimensi pemberdayaan masyarakat untuk menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Kerakyatan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Braga Kota Bandung?
2. Bagaimana Kemampuan Sosiopolitik dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Braga Kota Bandung?
3. Bagaimana Kompetensi Partisipatif masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Braga Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memotret gambaran pemberdayaan masyarakat baik yang secara langsung maupun tidak langsung terintegrasi dengan kegiatan *The Real Braga Tour* dilihat dari sudut pandang 3 (tiga) dimensi pemberdayaan masyarakat yaitu Kompetensi Kerakyatan, Kemampuan Sosiopolitik dan Kompetensi Partisipatif. Rekomendasi lainnya adalah program-program

pemberdayaan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan *The Real Braga Tour*, program tersebut diformulasikan menggunakan metode-metode yang tercantum dalam UNWTO *Sustainable Tourism – Eliminating Poverty*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dari sisi akademisi bahwa program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata dan kegiatan *slum tourism* yang mengedepankan prinsip *pro-poor* dapat menjadi salah satu metode untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Pagebluk COVID-19;
2. Keterbatasan literatur yang membahas mengenai kegiatan *The Real Braga Tour*. Ketersediaan literatur dapat membantu dalam menganalisa dan merumuskan usulan program pemberdayaan masyarakat;
3. Stigma bahwa *slum tourism* merupakan bentuk eksploitasi masyarakat pra-sejahtera yang seharusnya tidak diungkapkan kepada khalayak ramai.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh pembaca, baik di lingkungan akademik maupun non-akademik:

1. Memperkaya khasanah penelitian ilmiah dengan topik pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata khususnya *slum tourism*;

2. Sosialisasi UNWTO *Sustainable Tourism – Eliminating Poverty* sebagai salah satu metode dan panduan pemberdayaan masyarakat;
3. Menjadi referensi bacaan untuk memunculkan ide program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Braga;
4. Menghilangkan stigma eksploitasi dan *voyeurism* yang selalu dihubungkan dengan *slum tourism*;
5. Membuka peluang kerjasama antara NGO dan akademisi;
6. Mengisi dan menjembatani *gap* informasi antara penelitian terdahulu.